



Kebijakan Afirmatif di Malaysia: Analisis Idiosinkretis Penolakan Mahathir Mohamad untuk Meratifikasi ICERD

Dela Karisma

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip.undip.ac.id

ABSTRACT

In November 2018 Mahathir Mohamad, who re-assumed the position of Prime Minister of Malaysia stated that Malaysia would not ratify ICERD. It is considered by some to be a setback for the struggle of equalization of racial rights in Malaysia. Previous research on racial discrimination in Malaysia focused mostly on the human rights side and the roots of discrimination itself without specifically addressing the issue of ICERD. This study will analyze the rationale behind Malaysia's refusal to ratify ICERD using an idiosyncratic theory. Researcher place the level of analysis at the individual level, by examining Mahathir Mohamad. By analyzing elements of Mahathir Mohamad's leadership style, the researcher argues that the strong driving factor behind Malaysia's refusal to ratify ICERD is an element of Mahathir's experience and interest in politics as a person who was predominantly Malay-chauvinist because of his Malay-centric ideas.

Keyword: *Mahathir Mohamad, ICERD, Racial Discrimination, Leadership Style.*

PENDAHULUAN

Keputusan Mahathir Mohamad untuk tidak meratifikasi ICERD pada November 2018 lalu patut dipertanyakan. Hal itu dikarenakan misi pertama dari sembilan misi yang ia bawa pada saat pencalonannya sebagai perdana menteri adalah membina Malaysia yang bersatu padu, dimana hak-hak persamaan antar ras satu dan yang lainnya akan diperjuangkan (Lau, 2018). Pimpinan Suhakam, Razali Ismail, juga mengeluarkan pernyataan, “*Government need to bring people out of the straitjacket*” (CNA, 2018). Istilah ‘*straitjacket*’ merujuk kepada sistem diskriminasi rasial yang selama ini ada di Malaysia dan menempatkan ras Non-Melayu di posisi kelas dua. Besarnya jumlah etnis Non-Melayu yang terdiskriminasi di Malaysia – sekitar 40 persen (Setiawan, 2013, p. 215) – menyebabkan permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti. Bentuk diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Non-Melayu Malaysia adalah penerapan beberapa kebijakan seperti *New Development Policy* (NDP) yang merupakan lanjutan dari *New Economic Policy* (NEP). Salah satu tujuan adanya kebijakan tersebut ialah untuk menciptakan kelas bisnis bagi ras Melayu. Implikasi dari kebijakan tersebut antara lain adalah penetapan kuota untuk ras Melayu di beberapa universitas, seperti Universitas Teknologi MARA yang dikhususkan untuk ras Melayu, penyisihan 30 persen dari ekuitas perusahaan untuk ras Melayu,

diskon untuk pembelian mobil dan *real estate* bagi ras Melayu, dan disisihkannya sejumlah slot khusus untuk ras Melayu dalam proyek perumahan (Mokhtar, Reen, & Singh, 2013, pp. 12-16). Itu dari berbagai bentuk diskriminasi rasial yang terjadi di negara tersebut ialah ketentuan dalam Pasal 153 konstitusi Malaysia yang secara tersurat memberikan hak istimewa bagi etnis Melayu melalui penetapan kuota berbasis ras dalam bisnis dan pendidikan, serta memberikan kemudahan bagi etnis Melayu untuk mengakses kredit dan kontrak-kontrak karya.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis penyebab dari penolakan Malaysia untuk meratifikasi ICERD melalui kaca mata idiosinkretis. Idiosinkretis adalah teori yang berupaya untuk menganalisis kepribadian dari pembuat kebijakan. Tokoh yang dianalisis dalam hal ini adalah pemimpin negara, karena diasumsikan bahwa pucuk pimpinan dalam urusan kenegaraan itulah yang menentukan kebijakan yang akan diambil oleh negara tersebut. Juliet Kaarbo (1997) dalam tulisannya yang berjudul "*Prime Minister Leadership Styles in Foreign Policy Decision-Making: A Framework for Research*" menjelaskan lima elemen yang dapat membantu untuk menganalisis gaya kepemimpinan seorang Perdana Menteri dan kaitannya dengan kebijakan yang diambil (Kaarbo, 1997, pp. 364-369). Adapun kelima elemen tersebut adalah: 1) ketertarikan dan pengalaman di bidang politik; 2) orientasi kerja pemimpin negara; 3) strategi dalam menangani permasalahan; 4) strategi dalam mengumpulkan informasi; 5) strategi dalam menghadapi faksi partai di kabinet dan parlemen. Argumen dalam tulisan ini adalah bahwa elemen dalam gaya kepemimpinan Mahathir Mohamad merupakan faktor pendorong bagi keputusan Malaysia untuk tidak meratifikasi ICERD.

PEMBAHASAN

Perdana Menteri yang menjabat di Malaysia pada saat negara tersebut secara tegas menyatakan tidak akan meratifikasi ICERD adalah Mahathir Mohamad. Oleh karena itu, bagian ini akan menganalisis lima elemen dalam diri Mahathir Mohamad yang disampaikan oleh Juliet Kaarbo dalam tulisannya. Elemen Pertama, ketertarikan dan pengalaman Mahathir di bidang politik. Pada 1947, memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah medis King Edward VII di Singapura. Pengalaman yang ia dapatkan ketika menjalani pendidikan medis cukup membuktikan kepada dirinya bahwa pada waktu itu ras Melayu merupakan ras yang berada di posisi lebih rendah dibandingkan ras lain di Malaysia. Mahathir menceritakan bahwa pada saat itu hanya ada 10 persen pelajar yang merupakan ras Melayu, sisanya adalah ras Cina dan India. Pada waktu itu pelajar-pelajar Melayu di sana sering mendapat ejekan dari para senior.

All the Malay boys were called tanam padi (literally, "plant rice" since the seniors did not know the Malay for "padi planter") or pancing ikan (what they meant was "fisherman"). These were crude references to the lowly position Malays held in the Malayan social order back then. They were hurtful names, but they only made me even more determined to do well (Mohamad, 2011, p. 129).

Cemoohan terhadap dirinya justru membuat ia semakin termotivasi untuk segera menyelesaikan studinya dan berkecimpung di dunia politik.

Mahathir secara resmi menjadi bagian dari partai *United Malays National Organisation* (UMNO) pada 1947. Ia berhasil mendapatkan kursi di parlemen setelah memenangkan pemilihan umum di Malaysia tahun 1964 (Ray, 2018). Akan tetapi, ia kalah dalam pemilihan umum 1969 dan kehilangan kursinya di parlemen. Mahathir menyalahkan Tunku Abdul Rahman – Perdana Menteri Malaysia pada masa itu yang juga merupakan pimpinan UMNO – atas kekalahan tersebut. Mahathir menganggap bahwa kekalahan itu disebabkan oleh Tunku Abdul Rahman yang lalai mewakili rakyat karena terlalu sibuk berbisnis dengan orang-orang Cina Malaysia dan

mengabaikan parlemennya (BBC News, 2018). Pandangan tersebut ia sampaikan melalui surat terbuka.

Sikap Mahathir yang demikian menyebabkan dirinya dikeluarkan dari UMNO pada 1969. Selain karena konfrontasinya dengan Tunku Abdul Rahman, pandangan bahwa ia merupakan seorang tokoh ekstrem nasionalisme Melayu karena *Mahathirism* yang ia miliki juga menyebabkan dirinya dikeluarkan dari partai UMNO. *Mahathirism* adalah sebuah ideologi politik yang merupakan gabungan dari lima gagasan inti, yaitu nasionalisme, kapitalisme, islamisme, populisme, dan otoritarianisme (Teik, 2018, p. 2). Ideologi ini dapat dilihat secara koheren dari pidato, tulisan, wawancara, praktik yang ia lakukan sebagai politisi, serta kebijakannya sebagai pemimpin nasional. Gagasan inti dalam *Mahathirism* yang paling berkenaan dengan permasalahan ras Melayu adalah nasionalisme Melayu (Teik, 2018, pp. 2-3). Nasionalisme Melayu merupakan nasionalisme tertua dan dimanifestasikan oleh Mahathir dalam bentuk perjuangan mengatasi keterbelakangan perekonomian masyarakat Melayu Malaysia. Pada tahun 1969, pasca kekalahannya dalam pemilihan umum, ia menulis sebuah buku yang sangat kontroversial di zaman itu, yaitu *The Malay Dilemma*. Buku tersebut diterbitkan setahun pasca terjadinya kerusuhan 13 Mei 1969 di Malaysia. Dalam buku tersebut Mahathir berpendapat bahwa perlu langkah-langkah lebih kuat dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi orang Melayu. Ia juga menyatakan bahwa orang Melayu adalah orang asli dan pemilik sah Malaysia (Mohamad, 1970, pp. 1-5). Buku itu sempat dilarang peredarannya karena bernada provokatif.

Meskipun pada 1969 Mahathir tidak duduk secara resmi di dalam pemerintahan, namun pemikirannya untuk memperjuangkan hak ras Melayu Malaysia masih keras digaungkan. Perjuangan yang ia lakukan untuk mengatasi masalah keterbelakangan ekonomi ras Melayu di Malaysia dapat dilihat dari diberlakukannya NEP tahun 1970. Walau kebijakan NEP lahir pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Tun Abdul Razak, namun kontribusi pemikiran Mahathir cukup besar di dalamnya. Bahkan, dalam sebuah tulisan yang berjudul "*Malaysia's Unfulfilled Promise: The New Economic Policy in Arrears*", yang dikeluarkan oleh badan *Central Intelligence Agency* (CIA) pada Oktober 1985 disebutkan bahwa gagasan Mahathir mengenai kebijakan afirmatif bagi ras Melayu Malaysia merupakan fondasi filosofis dari NEP itu sendiri (Central Intelligence Agency, 1985, p. 4). Pada tahun 1970, setelah turunnya Tunku Abdul Rahman, Mahathir Mohamad kembali diundang untuk masuk ke dalam partai UMNO. Ia juga terpilih kembali ke parlemen pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia diangkat sebagai Menteri Pendidikan karena fokusnya yang cukup besar pada permasalahan pendidikan negara pada saat itu.

Pada Juni 1981, ia dipilih sebagai Presiden UMNO dan menjadi Perdana Menteri pada bulan Juli di tahun yang sama. Hal tersebut tak pelak menimbulkan kekhawatiran ras non-Melayu Malaysia. Non-Melayu secara alami merasa terancam terutama ketika mereka melihat kebijakan-kebijakan pemerintah semakin berkaitan dengan pemikiran Mahathir. Kepemimpinan Mahathir yang difokuskan untuk mengangkat orang-orang Melayu dapat dilihat melalui implementasi berbagai kebijakan seperti, tetap dijalankannya NEP hingga 1990, implementasi *New Development Policy* (NDP) (1991-2000), dan *National Vision Policy* (NVP) (2000-2010) yang sangat mengutamakan ras Melayu dan mengesampingkan orang India serta ras non-Melayu lainnya (Sikri, 2013). NDP sendiri merupakan lanjutan dari NEP yang berakhir pada 1990. Tujuan utama dari kebijakan tersebut sama dengan NEP, yaitu untuk mengurangi kemiskinan relatif atau ketimpangan pendapatan. *World Bank* menyatakan bahwa meskipun terdapat pergeseran fokus pada dua cabang strategi tersebut, NDP pada dasarnya masih NEP (World

Bank, 2004, p. 5). Keistimewaan dan perhatian khusus yang diberikan kepada masyarakat Melayu menyebabkan marjinalisasi orang non-Melayu di berbagai sektor termasuk bisnis, pendidikan tinggi, beasiswa, dan pengurangan ruang untuk promosi etnis dan hak budaya non-Melayu (Sikri, 2013). Selain itu, kebutuhan, hak-hak dasar, dan kesempatan yang sama untuk kemajuan orang India ditolak (Lahiri, 2008). Diskriminasi rasial orang India terbukti di banyak bidang, termasuk izin usaha, beasiswa pemerintah, sekolah dasar Tamil, aplikasi kewarganegaraan dan izin taksi, penjatahan tanah, penerimaan terbatas ke universitas, dan lain-lain (Lahiri, 2008). Hal itu menunjukkan bagaimana kebijakan Mahathir pada saat ia menjadi Perdana Menteri Malaysia keempat sangat menempatkan ras non-Melayu Malaysia di posisi subordinat.

Pengalaman politik yang dimiliki oleh Mahathir sejak awal dirinya berkecimpung di dalam perpolitikan Malaysia hingga saat ia menjadi Perdana Menteri Malaysia keempat menunjukkan bahwa sejak awal dirinya merupakan tokoh yang mendorong adanya hak istimewa bagi ras Melayu untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi ras Melayu itu sendiri. Bukunya yang berjudul *The Malay Dilemma* juga sangat menunjukkan bahwa dirinya melihat ras Melayu sebagai ras asli Malaysia sehingga harus menjadi tuan di tanahnya sendiri. Label yang ia sandang pada 1970 sebagai Malay-Ultra juga menggambarkan betapa ia vokal mengadvokasikan hak istimewa bagi ras Melayu pada masa itu. Pada saat ia menyampaikan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri tahun 2003, Mahathir juga berkata, *“I disappointed... because I have achieved too little in my principal task of making my race a successful race, a race that is respected”* (Ong, 2005, p. 7). Kalimat itu menggambarkan bahwa salah satu tujuannya menjabat sebagai seorang perdana menteri pada masa itu adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rasnya, yaitu ras Melayu. Keberpihakan Mahathir terhadap hak istimewa ras Melayu itu masih sama hingga saat ini. Dalam *website* Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) yang didirikan oleh Mahathir tahun 2016, tertulis 12 tujuan utama partai, dimana salah satunya adalah untuk mempertahankan kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Serawak (Parti Pribumi Bersatu Malaysia, 2016).

ICERD yang menginginkan penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras tentu bertentangan dengan tujuan tersebut. Hal ini menjadi faktor pendorong terhadap keputusan Malaysia untuk tidak meratifikasi ICERD. ICERD menuntut adanya persamaan hak terhadap seluruh warga negara tanpa membedakan ras mereka. Artikel 2 Ayat (1) (c) dari ICERD berbunyi, *“Each State Party shall take effective measures to review governmental, national and local policies, and to amend, rescind or nullify any laws and regulations which have the effect of creating or perpetuating racial discrimination wherever it exists”*. Dengan kata lain, meratifikasi ICERD berarti harus menghapuskan berbagai kebijakan yang memberikan hak istimewa terhadap satu ras tertentu – seperti kebijakan NDP yang merupakan lanjutan dari NEP – dan harus mengamandemen Pasal 153 di dalam konstitusi mereka. Ketika membicarakan mengenai ICERD pada pidatonya di UiTM Shah Alam Desember 2018 lalu, Mahathir menyatakan bahwa bumiputera harus diberikan kesempatan yang lebih.

If we want them (The Malays) to be able to catch up with those in front of them, they must be given the opportunity to catch up. If we don't give to the Malays a little more opportunities than the other races, if we believe we must give everyone the same thing, to give in to equality, then only those who are able to do so will succeed. Those who are not will fall behind. That's why we cannot accept ICERD (The Star Online, 2018).

Perdana Menteri berusia 93 tahun itu juga pernah menyebutkan dalam sebuah wawancara, “ICERD mempromosikan kebebasan dan menekan diskriminasi. Pasal 153 (di Konstitusi) memberikan keistimewaan pada penduduk asli, yang ditafsirkan sebagian orang sebagai diskriminasi. Penghapusan keistimewaan ini akan bertentangan dengan Pasal 153” (Tirto.id, 2018). Dalam wawancara eksklusifnya dengan Najwa Shihab yang dirilis di dalam akun Youtube Najwa pada 9 Agustus 2019, Mahathir menyetujui pandangan bahwa ras lain yang ada di Malaysia adalah imigran sehingga mereka harus mau menerima ketentuan-ketentuan yang diberlakukan Melayu di Malaysia jika ingin diterima di negara tersebut (Shihab, 2018). Pandangan itu ia dapatkan melalui pengalaman hidupnya selama ia bersekolah hingga ketika ia awal masuk ke dalam dunia politik. Mahathir melihat adanya keterbelakangan ras Melayu dibanding ras lain pada waktu itu terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk mengatasi keterbelakangan tersebut. Pandangan itu yang kemudian menjadi faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan untuk tidak meratifikasi ICERD, dan turut mempengaruhi empat elemen lain dalam gaya kepemimpinannya.

Selanjutnya elemen kedua, orientasi kerja Mahathir Mohamad. Menurut Juliet Kaarbo (1997, p.565), ada dua jenis gaya kepemimpinan perdana menteri. Pertama, perdana menteri yang mengedepankan pencapaian tujuan, meskipun untuk mencapai tujuan tersebut ia bisa saja menghasilkan hubungan yang kurang baik dengan pihak lain. Kedua, perdana menteri yang cenderung permisif dalam hal pencapaian target, dan lebih mementingkan terjaganya suasana yang kondusif dalam hubungannya dengan pihak lain. Dalam memoarnya, Mahathir menuliskan, “*my confidence in myself and my chosen direction has always allowed me to live with disagreement, with people who think and act differently from myself. Perhaps i was being over-confident but to me it is important...*” (Mohamad, 2011, p. 413). Kutipan pernyataan tersebut sudah cukup menggambarkan bahwa Mahathir adalah sosok pemimpin negara yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan nilai-nilai yang ia rasa benar. Pada saat Mahathir menduduki jabatan sebagai menteri pendidikan, ia juga sering kali mengkritisi kinerja menteri lain pada saat pertemuan kabinet. Ia tetap melakukan hal tersebut kendati ia memahami bahwa sikapnya itu tidak disukai oleh beberapa menteri dan dapat menimbulkan hubungan interpersonal yang kurang baik (Mohamad, 2011, p. 355).

Kemudian, jika mengamati rekam jejak hubungan politik Mahathir dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dapat dilihat bahwa Mahathir adalah sosok yang tidak pernah ragu untuk mengambil keputusan tertentu yang menurut dirinya adalah tindakan yang tepat kendati hal tersebut akan mengganggu hubungannya dengan orang lain. Bisa dikatakan, hubungan kedua tokoh politik Malaysia tersebut adalah sebuah kisah yang aneh sepanjang tiga dekade. Sebuah keniscayaan politik, yang diyakini bahwa tak ada musuh dan kawan yang abadi. Mahathir dan Anwar adalah bukti nyata, kala kawan menjadi lawan di saat tujuan mereka berbeda. Sejak awal masuknya Anwar ke dalam UMNO, hubungan keduanya sangat erat. Bahkan Anwar diangkat sebagai wakilnya pada 1993. Namun, pada 1998 secara mengejutkan Mahathir melakukan pemecatan atas Anwar Ibrahim. Pemecatan tersebut ia lakukan karena perbedaan pandangan antar keduanya terkait cara mengatasi krisis finansial yang melanda negara tersebut pada masa itu. Hingga 2013, ketegangan masih mewarnai hubungan di antara keduanya. Namun, secara mengejutkan pada 2018 ia meminta maaf kepada Anwar dan bergabung menjadi satu dalam koalisi Pakatan Harapan. Hal itu ia lakukan karena ia membutuhkan Anwar sebagai pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) untuk mengalahkan Najib Razak yang diusung oleh koalisi Barisan Nasional yang berkuasa sejak negara itu merdeka. Melalui rekam jejak hubungannya dengan Anwar Ibrahim dapat kita lihat bahwa Mahathir adalah sosok yang tidak berorientasi

pada hubungan interpersonal. Mahathir lebih mementingkan tercapainya tujuan yang ingin ia raih dalam memimpin. Bahkan lebih ekstrem lagi dapat dikatakan bahwa Mahathir adalah sosok yang cenderung pragmatis, dimana ia akan melakukan hal-hal yang membawa manfaat praktis bagi pencapaian tujuan yang ia inginkan. Ia bisa menjadikan kawan politik menjadi lawan ketika ada pandangan yang berbeda diantara keduanya, dan dapat pula membuat lawannya itu menjadi kawan kembali ketika hal tersebut dapat membawa manfaat bagi pencapaian tujuannya.

Orientasi kerjanya yang berfokus pada pencapaian tujuan dan nilai yang ia rasa benar turut mendorong sikapnya untuk tidak meratifikasi ICERD, meskipun ia tahu bahwa beberapa pihak tidak senang dengan keputusannya itu. Mahathir secara sengaja tidak menghadiri undangan dari Suhakam pada 9 Desember 2018. Mahathir menyatakan, *“I decided that we will not accept ICERD, (but) Suhakam wants to accept ICERD, so how can I go?”* (MalaysiaKini, 2018). Sebagai pemimpin negara yang memiliki orientasi kerja yang berfokus pada pencapaian tujuan, Mahathir tidak akan mengakomodir pendapat Suhakam dan ras non-Melayu yang bertentangan dengan tujuannya untuk mempertahankan hak istimewa ras Melayu. Orientasi kerjanya itu turut mempengaruhi keputusan untuk tidak meratifikasi ICERD. Pandangan terkait tujuan yang ia rasa benar itu terbentuk karena elemen pertama dalam gaya kepemimpinannya, yaitu pengalaman yang ia miliki di bidang politik.

Berikutnya, elemen ketiga yaitu strategi dalam menghadapi permasalahan. Mahathir adalah seorang advokat yang cenderung memaksakan posisi dan pandangan pribadinya dalam mengatasi suatu permasalahan. Mahathir memang sering melempar berbagai isu ke dalam kabinet untuk diperbincangkan, namun selama forum berlangsung ia cenderung akan bersifat persuasif, bahkan memaksa, agar orang lain mengamini pandangannya. Rekam jejaknya yang pernah menjalani pendidikan di sekolah medis menyebabkan dirinya menggunakan prosedur medis dalam menganalisa dan mengatasi permasalahan negara (Mohamad, 2011, p. 127). Dalam buku yang ia tulis berjudul *The Early years 1947-1970* Mahathir mengatakan bahwa ia melihat keterbelakangan ras Melayu sebagai gejala yang akan berujung kepada penyakit yang lebih besar – sebagaimana yang terjadi di Amerika, Inggris, dan Afrika – yaitu kerusuhan akibat intoleransi ras, dimana ras Melayu yang seharusnya menjadi tuan di tanah sendiri malah terpinggirkan (Mohamad, 1995, p. 133). Mahathir melihat ketertinggalan ras Melayu sebagai salah satu penyakit sosial yang harus diobati, dan pemberian hak istimewa bagi ras Melayu merupakan obat yang tepat agar ras itu dapat mengejar ketertinggalan mereka sehingga sentimen antar ras dapat dihilangkan. Oleh karena itu, ia sangat mendukung NEP. Dalam tulisannya ia menyebutkan bahwa NEP bukan hanya kebutuhan ras melayu, melainkan kebijakan pemerintah yang harus dilakukan untuk mencapai kohesi nasional (Mohamad, 2011, pp. 51-52). Kenyataan bahwa Mahathir adalah seorang advokat turut mempengaruhi keputusan untuk tidak meratifikasi ICERD. Meskipun beberapa masukan pro ratifikasi diberikan kepadanya, namun ia tetap mempertahankan pandangan pribadinya dalam menanggapi permasalahan tersebut, yaitu dengan menolak ratifikasi konvensi itu.

Elemen berikutnya adalah strategi Mahathir dalam mengumpulkan informasi. Sebelum permasalahan ratifikasi ICERD muncul ke permukaan, Mahathir sendiri sudah sangat mengenal dengan baik berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hak istimewa ras Melayu. Mayoritas tulisan yang ia buat juga membahas mengenai permasalahan tersebut. Ia sudah mempelajari mengenai ras Melayu sepanjang hidupnya melalui berbagai pengalamannya sendiri. Sebagaimana ia tuliskan di dalam memoarnya, *“To understand the Malays we need first to examine their origins and the journey they have taken to reach where they are today. I began my study early, knowing that if I was to champion their cause, I would need to know them more*

intimately” (Mohamad, 2011, p. 43). Sejak masih sekolah, Mahathir juga sudah banyak membaca tulisan-tulisan mengenai ras Melayu. Hal itu ia sampaikan di dalam memoarnya, *What I had been taught in school was very sketchy. Apart from text books, I read books on Malayan history by British administration such as Sir Richard Winstedt, Sir Frank Swettenham and many academics. I also read the Sejarah Melayu, the Hikayat Hang Tuah, and Hikayat Merong Mahawangsa. In world history, the Malays are mentioned in documents going as far back as the time of Alexander the Great* (Mohamad, 2011, p. 43).

Berbagai informasi terkait ras Melayu yang ia kumpulkan sejak duduk di bangku pendidikan membentuk pemikirannya bahwa ras Melayu merupakan ras asli yang tertinggal di negara sendiri, dan untuk membantu ketertinggalan itu dibutuhkan hak istimewa yang dapat mendorong ras Melayu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal itu turut mendorong keputusannya untuk tidak meratifikasi ICERD.

Selanjutnya, Elemen kelima adalah strateginya dalam menghadapi faksi partai di kabinet dan parlemen. Terkait isu ratifikasi ICERD, pemikiran Mahathir untuk menolak ratifikasi sejalan dengan pemikiran oposisi dari koalisi Barisan Nasional. Partai-partai dalam koalisinya juga sebagian besar mendukung keputusannya itu. Bahkan, DAP pada akhirnya menyetujui keputusan perdana menteri untuk tidak meratifikasi ICERD. Sekretaris Jenderal partai DAP yang menduduki jabatan menteri keuangan di kabinet Mahathir, Lim Guan mengatakan bahwa DAP menyerahkan penanganan isu tersebut kepada Perdana Menteri Mahathir Mohamad (News Straits Times, 2018).. Nampaknya para politisi di DAP saat itu berusaha untuk mengamankan kursi mereka di kabinet. Sebagaimana sudah disebutkan di dalam bagian orientasi kerja Mahathir Mohamad, ia adalah seorang tokoh yang pragmatis, dimana pola hubungannya dengan pihak lain di dalam kabinet bergantung kepada kesamaan pandangan mereka. Selama anggota kabinet itu memiliki pandangan yang sejalan dengan pemikirannya, akan terbangun pola hubungan yang bersifat kooperatif. Sebaliknya, ketika pemikiran anggota kabinet itu bertentangan dengan pandangannya, pola hubungan yang terbangun cenderung bersifat konfrontatif. Sebuah tulisan berjudul *“Iron Cage in an Iron Fist: Authoritarian Institutions and the Personalization of Power in Malaysia”* yang dibuat oleh Dan Slater – professor yang mengkhususkan diri dalam bidang politik, sejarah kediktatoran, dan demokrasi dengan fokus regional di Asia Tenggara – menyebutkan, *“If Mahathir chooses to crush rather than accommodate his personal rivals, he can count on formidable authoritarian institutions to carry out his orders. Only a brave or self-destructive few are willing to risk a confrontation with Mahathir's infrastructural power by challenging his despotic power”* (Slater, 2003, p. 83).

KESIMPULAN

Elemen-elemen dalam diri Mahathir yang dianalisis dalam tulisan ini memiliki pengaruhnya masing-masing terhadap keputusan Malaysia untuk tidak meratifikasi ICERD. Akan tetapi, hasil analisis menunjukkan bahwa elemen yang memiliki pengaruh paling signifikan adalah elemen pertama, yaitu ketertarikan dan pengalamannya di bidang politik, di mana inilah yang mempengaruhi empat elemen lain. Ketertarikan dan pengalaman politik Mahathir Mohamad menunjukkan bahwa ia adalah seorang tokoh yang pernah dilabeli sebagai Melayu-Ultra. Pandangan Mahathir sejak dulu memang sudah sangat difokuskan kepada upaya-upaya peningkatan kehidupan ras Melayu Malaysia. Pandangan itu didapatkan dari pengalaman hidupnya yang melihat bahwa Melayu menjadi ras yang lemah di negara sendiri. Penggunaan teori idiosinkretis Juliet Kaarbo menyebabkan penelitian ini hanya berfokus kepada elemen yang

ada di dalam diri Mahathir Mohamad dan mengabaikan faktor lain yang mungkin turut mempengaruhi keputusan tersebut seperti tekanan dari kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan dorongan dari partai oposisi. Pengambilan keputusan mengenai ratifikasi ICERD ini merupakan hal yang sifatnya sangat politis dimana tarik ulur kepentingan antar elemen di dalam negeri juga pasti turut mempengaruhi. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya lebih memfokuskan penelitiannya terhadap proses *decision-making* dalam tubuh kabinet dan parlemen pada saat Mahathir menjabat dalam mengambil keputusan untuk tidak meratifikasi ICERD.

REFERENSI

- BBC News. (2018, Mei 10). *Mahathir Mohamad: Malaysian political survivor*. Retrieved September 8, 2019, from BBC News World Asia: <https://www.bbc.com/news/world-asia-44028023>
- Central Intelligence Agency. (1985). *Malaysia's Unfulfilled Promise: The New Economic Policy in Arrears*. 4.
- Fernando, J. M. (2014). Special Rights in the Malaysian Constitution and the Framers' Dilemma, 1956–57. *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, 3.
- Kaarbo, J. (1997). Prime Minister Leadership Styles in Foreign Policy. *Political Psychology*, Vol. 18, No. 3, 570.
- Lahiri, D. (2008). Malaysian Indian community: Victim of 'Bumiputera' Policy. *ORF Issue Brief*, 20.
- Liow, J. (2003). Keperibadian, Tuntutan dan Luar-Jangkaan: Penentu Dasar Luar Malaysia dalam Pentadbiran Mahathir. In H. K. Leong, & J. Chin, *Pentadbiran Mahathir Prestasi dan Krisis dalam Pemerintahan* (pp. 156-157). Singapore: Times Book.
- MalaysiaKini. (2018, Desember 8). *Dr M: How can I attend Suhakam event when it wants Icerd?* Retrieved Desember 19, 2019, from <https://www.malaysiakini.com/news/455274>
- Mohamad, M. (1970). *The Malay Dilemma*. Kedah.
- Mohamad, M. (1995). *The Early years 1947-1970*. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd.
- Mohamad, M. (2011). *A Doctor in The House The Memoirs of Tun Dr Mahathir Mohamad*. Kuala Lumpur: MPH Group Printing (M) Sdn Bhd.
- Mokhtar, K. S., Reen, C. A., & Singh, P. J. (2013). The New Economic Policy (1970 – 1990) in Malaysia: The Economic and Political Perspectives. *GSTF International Journal on Media & Communications(JMC) Vol.1 No.1*, 1.
- Ness, G. D. (2014). The Malay Dilemma. by Mahathir ein Mohamad . *The Journal of Asian Studies*, 223.
- New York Times. (1981). *Malaysians Depict China as A Threat*. New York.
- News Straits Times. (2018, November 18). *DAP distances itself from commenting on ICERD*. Retrieved Desember 13, 2019, from <https://www.nst.com.my/news/nation/2018/11/432371/dap-distances-itself-commenting-icerd>
- Ong, H. (2005). A Doctor's Duty is to Heal the Unhealthy: The Story of Tun Dr Mahathir Mohamad . *Annals Academy of Medicine*, 1.
- Parti Pribumi Bersatu Malaysia. (2016). *Prinsip-Prinsip Perjuangan*. Retrieved Desember 7, 2019, from <https://www.pribumibersatu.org.my/prinsip.php>

- Ray, M. (2018, Juli 23). *Mahathir Bin Mohamad Prime Minister of Malaysia*. Retrieved September 8, 2019, from Encyclopedia Brytannica: <https://www.britannica.com/biography/Mahathir-bin-Mohamad>
- Shihab, N. (2018, Desember 5). *Mahathir Bicara Ulama dan Jokowi | Catatan Najwa*. Retrieved Agustus 9, 2019, from <https://www.youtube.com/watch?v=sLUSDBkVwzo&t=1256s>
- Sikri, V. (2013). *India and Malaysia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Slater, D. (2003). Iron Cage in an Iron Fist: Authoritarian Institutions and the Personalization of Power in Malaysia . *Comparative Politics, Vol. 36, No. 1* , 81-101.
- Teik, K. B. (2018). Mahathir Mohamad Returns, but what of Mahathirism? . *ISEAS – Yusof Ishak Institute Analyse Current Events Iseas – Yusof Ishak Institute Analyse Current Events* , 2-3.
- The Star Online. (2018, November 18). *Dr M: Implementing ICERD 'almost impossible', requires amendment to Federal Constitution*. Retrieved Desember 13, 2019, from The Star Online: <https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/11/18/dr-m-implementing-icerd-almost-impossible-requires-amendment-to-federal-constitution>
- Tirto.id. (2018, Desember 12). *Aksi 812: Supremasi Melayu-Islam Yes, Konvensi Anti-Diskriminasi No*. Retrieved Desember 19, 2019, from <https://tirto.id/aksi-812-supremasi-melayu-islam-yes-konvensi-anti-diskriminasi-no-dbGJ>
- World Bank. (2004). Malaysia: 30 Years of Poverty Reduction, Growth and Racial Harmony. *Economic Planning Unit Federal Government Administrative Centre*, 3-5.